

BAB II

Kerangka Teori dan Konseptual

A Kerangka Teori

1. Budaya Politik

Budaya politik sebagai kondisi – kondisi yang dapat mewarnai corak kehidupan dalam bermasyarakat, dan merupakan bagian dari kehidupan berpolitik. Dimana dari budaya politik itu menjadi sebuah fenomena dalam masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap struktur dan sistem dalam dunia perpolitikan itu sendiri.

Almond dan Verba mendefinisikan bahwa budaya politik sebagai salah satu sikap dari orientasi sebuah khas warna dari sebuah negara terhadap sistem perpolitikan dan dari aneka ragam bagiannya, serta sikapnya terhadap peranan warga negara yang telah ada di dalam sistem itu.²² Dan bagaimana distribusi pola-pola orientasi menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh Almond dan Verba telah mengatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta memertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

²² Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (terj. Sahat Simamora), (Bumi Aksara, 1990), 13.

Rusadi Sumintapura menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu itu sendiri dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota suatu sistem politik itu sendiri.²³ Dengan pengertian budaya politik tersebut, pemahaman konsep yang lebih lanjut terletak pada dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu.

Alamond dan Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik, terdapat tiga komponen yakni komponen kognitif, afektif dan evaluatif. Dengan menggunakan tiga komponen tersebut kita dapat mengukur bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik.

Dari komponen kognitif kita dapat menilai tingkat kemampuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh- tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol- simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya. Komponen afektif akan berbicara tentang bagaimana perasaan seorang warga negara terhadap aspek aspek sistem politik tertentu yang dapat memebuatnya menerima atau menolak sistem politik itu dalam secara keseluruhan. Keluarga dan lingkungan hidup seseorang, pada umumnya berpengaruh terhadap pembentukan perasaan individu yang bersangkutan terhadap aspek- aspek politik. Sedangkan komponen efaluatif, orientasi politik ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dipunyai oleh seseorang. Dalam hal ini, norma- norma yang dianut akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap kehadiran sistem politik, Bagian- bagian, simbol- simbol

²³ *Ibid.*

dan norma- norma yang dimiliki masyarakat. Orientasi evaluatif ini , yakni keputusan dan praduga tentang obyek- obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standart nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Orientasi ealuatif berkaitan erat dengan evolusi normatif, moral politik dan etika politik. Etika politik yang akan memepertanyakan argumentasi mereka masing- masing, memeriksa logika logikanya dan imlikasi- implikasi etisnya, yang pada gilirannya mengambil suatu sikap yang bisa tegas bisa juga secara normatif, bergantung kepada kepastian yang telah dicapai.²⁴

Berdasarkan sikap itulah, maka dirumuskan prinsip- prinsip hasil perpaduan antara prinsip- prinsip dasardan struktu- struktur realitas. Dengan prinsip- prinsip itu pula warga negara melakukan pilihan evaluasi terhadap sistem dan struktur politiknya. Perlu di dasari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpilah- pilah justru saling terkait atau sekurang kurangnya saling mempengaruhi.

Hakekat kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol- simbol yang ekspresif dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan politik, maka jika ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu bangsa secara bulat dan utuh, maka kita pun dituntut untuk melakukan penelahan terhadap sisinya yang lain.

²⁴ Franz Magnes Suseno. *Etika Politik, Prinsip –Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 26.

Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem, disamping itu kebudayaan politik lebih mengutamakan dimensi psikologi suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan atau simbol- simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam masyarakat sekaligus harapan- harapannya.

Albert Wijaya dalam desrtasinya, menggunakan konsep budaya tidak jauh berbeda dengan konsep ideologi termasuk di dalamnya sistem kepercayaan dan nilai- nilai merupakan bagian dari budaya politik yang biasanya menyangkut masalah nilai dan pandangan politik yang hampir selalu berkaitan dengan peraturan dan pertarunga kekuasaan. Lebih jauh Albert menyatakan bahwa budaya politik adalah aspek- aspek politik dari sistem- sistem nilai yang terdiri dari : ide- ide, pengetahuan, adat –istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut member rasional untuk menolak atau menerima nilai- nilai dan norma lain.²⁵

2. Klasifikasi Budaya Politik Menurut Gabriel Almond ²⁶:

a. Budaya politik parokial (parochial political culture) yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan yang rendah). Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik yang relatif tradisional sederhana (pranata, nilai- nilai, adat istiadat masih dipegang teguh oleh masyarakatnya) dan terbatasnya wilayah dan

²⁵ Albert Wijaya, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 3.

²⁶ Grabiell A. Almond dan Sidney Verba., *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*,(Jakarta: Bumi Aksara,1990), 15-17.

deferensiasinya, maka tidak terdapat peranan politik yang khas dan berdiri sendiri. Masyarakat biasanya tidak terlalu menaruh minat terhadap objek politik yang luas, aktivitasnya hanya berkisar pada profesi dan kegiatan sosial pada umumnya. Sehingga masyarakat budaya parokial tidak banyak menaruh harapan dengan sistem politik.

b. Budaya politik kaula (subyek political culture) yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tapi masih relatif pasif. Masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak berdaya untuk mengubah sistem. Dengan demikian secara umum, mereka menerima, mematuhi, loyal dan setia terhadap anjuran, perintah dan kebijaksanaan penguasa.

c. Budaya politik partisipan (participant political culture) yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi. Mereka menganggap dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasikan dan menggunakan hak politiknya. Mereka memiliki kesadaran sebagai totalitas, masukan, keluaran dalam kontelasi sistem politik yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik (political culture) yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah budaya dari keseluruhan dari pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dari psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu

dan beroperasi diseluruh masyarakat, serta harapan harapannya. Kegiatan politik misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan- tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangan mengenai situasi politiknya.

Bentuk budaya politik dari masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari sistm, olh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status social, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat 4 variabel:

1. kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain dengan membagi sumber-sumber diantara kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat itu sendiri.
2. Kepentingan tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik
3. kebijakan hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan , biasanya dalam bentuk perundang undangan.
4. budaya politik orientasi subjek dari individu terhadap sistem politik.²⁷

²⁷ Miriam budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 49.

3. Kebudayaan menurut koentjaraningrat

merupakan sesuatu yang terdiri dari berbagai unsur yang terkait secara fungsional satu sama lain, sehingga suatu kebudayaan juga merupakan sebuah sistem yang unsur- unurnya relatif terintegrasi satu dengan yang lain, dan akhirnya pada seluruh sistem.

Dalam suatu masyarakat yang telah terbentuk dengan sistem kebudayaan, akan dapat memiliki suatu bentuk perilaku dan perbuatan manusia dalam kelompok kebudayaan tersebut. Masyarakat memiliki suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang akhirnya menjadi kebudayaan. Jika kebiasaan itu tidak mendapatkan sanksi dari masyarakatnya dan orang yang dianggap paling tua di wilayah tersebut.

Untuk itu dapat diambil contoh karena masyarakat tersebut masih mempercayai paranormal atau yang disebut sebagai orang yang memiliki kekuatan supranatural, yang mereka yakini dapat membantu dan menolong orang yang mengalami kesulitan. Serta sebagai perantara untuk memenuhi segala kebutuhan yang ingin dicapai, seperti memperoleh kewibawaan, pengasih, pemikat dan kekebalan itulah yang selalu di inginkan dalam kehidupan untuk menjadi orang yang sempurna.²⁸

²⁸ Lusyanna Susanto. *Susuk Penyanyi Dangdut* (Studi Etnografi Mengenai Fungsi Susuk Pada Penyanyi Dangdut Wanita Di Surabaya). Departemen Antropologi FISIP UNAIR. 2008, 8.

4 Agama sebagai Sistem Budaya, Clifford Geertz

Menurut Clifford Geertz merupakan:

1. Suatu sistem keteraturan dari makna simbol- simbol, Yang dengan makna dan simbol- simbol tersebut individu mendefinisikan dunia mereka, Mengekspresikan perasaan- perasaan mereka, Dan membuat penilaian mereka.
2. Suatu pola makna- makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk- bentuk simbolik tersebut manusia berkomunikasi, memantapkan, dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan bersikap tentang kehidupan.
3. Suatu peralatan simbolik bagi perilaku, sumber- sumber ekstrasomatik dari informasi.
4. Karena kebudayaan adalah suatu sistem simbol, maka proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan, dan diinterpretasikan.

Geertz dalam *The Interpretation of Culture* menunjukkan bahwa meskipun istilah “ budaya “ cenderung memiliki arti yang cukup luas namun kunci dari setiap kebudayaan adalah ide tentang “ makna “ atau “ signifikansi “. Geertz melihat kebudayaan tidak hanya didasarkan pada kode- kode simbolik yang berdiri sendiri, melainkan kebudayaan melalui perilaku atau tindakan sosial itulah simbol- simbol tersebut saling berkaitan dan memiliki artikulasi. Dalam hal ini konsep- konsep abstrak dari tindakan seperti “ ritual “, “ identitas “, dan “ struktur “, dapat di terjemahkan signifikansi serta fungsinya.

Geertz telah lama mengkaji tentang aspek spiritualitas masyarakat Jawa. Dalam tulisannya yang berjudul *The Religion of Java* (1960). Geertz menterjemahkan agama sebagai fakta budaya, bukan hanya sebagai ekspresi kebutuhan sosial. Geertz melihat secara mendalam pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat Jawa melalui simbol, ide, ritual, dan kebiasaan. Dalam tulisan tersebut Geertz menggambarkan dimensi budaya dari agama. Ia menggambarkan kebudayaan sebagai susunan arti atau ide, yang dibawa simbol, tempat seseorang meneruskan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan sikap mereka terhadapnya²⁹.

1. Kerangka konseptual

1. Aktor Politik

Aktor-aktor politik merupakan individu-individu yang melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan.³⁰ Mereka berupaya melakukannya dengan cara mendapatkan kekuasaan politik lembaga, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, dimana kebijakan-kebijakan yang terpilih bisa diimplementasikan.

Yang termasuk dalam kategori aktor politik adalah partai-partai politik yang mapan: kumpulan individu dengan pemikiran yang kurang lebih sama, yang bergabung dalam sebuah struktur ideologis dan organisasional yang disepakati

²⁹ Geertz, Clifford. *Dalam Shajarat Theoris of Religion. Agama Sebagai Sistem Budaya*, (Jakarta, 1996), 406.

³⁰ Brian McNair, *An Introduction To Political Communication*, (London and New York : Routledge, 2003), 5.

bersama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Tujuan-tujuan ini akan merefleksikan sistem nilai atau ideologi yang mendasari partai. Dan Nimmo menyebut kriteria aktor politik adalah orang yang berbicara tentang politik atau dalam setting politik, seperti politikus, professional dan aktivis.³¹

Aktor-aktor politik juga mencakup sejumlah organisasi nonpartai dengan tujuan politis, atau biasa disebut dengan Organisasi Masyarakat. Organisasi ini tidak memiliki tujuan untuk berkuasa, tapi tetap memiliki kepentingan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Contohnya adalah LSM atau NGO yang mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu, ada juga yang disebut kelompok penekan. Berbeda dengan organisasi publik, mereka kurang terlembagakan dan jelas-jelas memiliki tujuan yang lebih politis, terfokus pada isu-isu tertentu yang spesifik seperti isu lingkungan, perlindungan terhadap hewan dan lain-lain.

Sedangkan yang termasuk kedalam aktor politik dalam penelitian ini yaitu seseorang yang berbicara tentang politik baik politikus maupun dalam lingkup organisasi partai politik yang berupaya mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan hal-hal berbau mistik sehingga memiliki keterkaitan dengan paranormal dan dunia supranatural.

2 Konseptual Dunia Supranatural

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Supranatural atau sama artinya dengan kesakten yang dalam bahasa Indonesianya disebut kesaktian (sifat

³¹Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Terjemahan), (Bandung: Rosdakarya, 2004), 30.

sakti) yaitu kekuatan supranatural yang dimiliki oleh seorang dukun atau paranormal. Kekuatan tersebut berupa kekuatan yang sifatnya metafisik, tidak dapat dilihat bentuknya tapi keberadaannya dan efeknyayang dapat dirasakan. Mencari kesakten dilakukan melalui tirakat- tirakat dan ritual- ritual yang ketat. Kesakten tersebut kemudian dapat membuat orang memiliki kekuatan lebih dibanding orang lain yang tidak memiliki kekuatan tersebut.

Kesakten adalah sumber kekuatan yang digunakan dukun atau paranormal untuk menolong masyarakat dan sekaligus mempengaruhinya. Dukun atau paranormal menjadi sangat dihormati oleh masyarakat karena dengan memiliki kesakten yang dimilikinya membuat masyarakat menjadi takut.

3 Konseptual Paranormal/ Dukun

Pada umumnya yang sering disebut dengan dukun atau paranormal adalah seseorang yang dianggap memiliki kemampuan atau pengetahuan yang tak semua orang memilikinya. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang dukun atau paranormal cenderung bersifat supranatural, mistis dan terkadang tidak dapat dijelaskan secara logika dan realistis. Biasa di sebut di Jawa sebagai ngelmu, seperti misalnya dapat menyembuhkan penyakit orang yang sakit, peramal kejadian masa depan, memiliki ilmu sihir, serta melalui “ kesaktennya “ seorang dukun atau paranormal dianggap oleh para warga mampu membantu dan memecahkan masalah kehidupan sehari- hari masyarakat.

Ada beberapa macam dukun atau paranormal, Clifford Geertz³² menyebutkan macam dukun atau paranormal tersebut seperti misalnya dukun bayi, dukun pijet, dukun atau paranormal yang menggunakan perewangan, dukun sunat, dukun atau paranormal ahli pada upacara panen, dukun sihir, dukun susuk. Demikian juga pada Kecamatan Bubutan terdapat dukun bayi yang membantu proses kelahiran bayi, dukun pijat, dukun yang memiliki perewangan serta dukun ahli susuk.

Sedangkan dalam penelitian inilah yang dimaksud dengan dukun atau paranormal yang adalah seseorang yang mampu membantu aktor politik dalam menyelesaikan problem politis yang dihadapi baik berupa pemberian susuk untuk menunjukkan kharisma seorang aktor politik maupun paranormal yang mampu membantu dalam proses penyelesaian problem sebagaimana yang diminta oleh aktro politik.

4 Teori Magi

Magi (sihir) adalah kepercayaan dan praktik menurut mana manusia yakin bahwa secara langsung mereka dapat mempengaruhi kekuatan alam dan antar mereka sendiri, entah untuk tujuan baik atau buruk, dengan usaha-usaha mereka sendiri dalam memanipulasi daya-daya yang lebih tinggi. Mereka yang mengetahui rahasia-rahasia penting, dapat menguasai daya-daya tak kelihatan

³² Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1960), 116-117.

yang memerintah dunia, dan karena itu mengontrol daya-daya ini demi kepentingan orang yang menjalankannya.

Kesusasteraan etnologis membedakan secara umum antara magi putih dan magi hitam menurut tujuannya masing-masing; yakni apakah hal itu dilaksanakan untuk menolong atau mencederai orang. Pada umumnya magi hitam dianggap tidak etis dalam hal sikap maupun campur tangannya dalam hubungan antarpribadi. Orang-orang primitif melihat penggunaan magi hitam sebagai suatu kejahatan yang sungguh-sungguh melawan masyarakat. Orang jahat dalam arti sepenuhnya adalah orang yang mengarahkan pengetahuan dan bakatnya dalam hal magi hitam untuk melawan anggota-anggota dari kelompoknya sendiri.³³

Menurut Malinowski Magi biasanya merupakan keadaan di mana seseorang mempergunakan penyihir untuk memenuhi maksud-maksud pribadi tertentu, seperti misalnya kematian seorang musuh, realisasi cinta dari laki-laki atau wanita yang diinginkan, penyembuhan penyakit, tercapainya kemakmuran atau kemenangan atas suatu perang. Magi bertujuan mencapai hubungan dengan daya-daya alam, pada hakikatnya bersifat manipulatif, yakni mau mengontrol daya-daya alam tersebut untuk kepentingan pribadi.

Akhir-akhir ini para antropolog telah melihat magi dan kepercayaan merupakan bagian integral dari kehidupan budaya dan karena itu hanya dipahami dalam konteks sosial. Kepercayaan ini mampu menjelaskan musibah dan kejadian yang terjadi secara kebetulan, membuat orang mampu memproyeksikan harapan-

³³ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Yogyakarta: kanisius, 1995), 47-48.

harapan mereka, ketakutan dan kekecewaan mereka atas sesamanya, dan dengan cara mempribadikan daya-daya yang dapat kita sebut sebagai “nasib” atau “keberuntungan”, kepercayaan-kepercayaan tersebut membuat orang-orang menderita karena daya-daya itu menjadi berani menghadapinya dengan tindakan bersama yang secara langsung melawan orang-orang yang diduga merancang kejahatan.³⁴

5 Fungsionalisme Kebudayaan

Teori *Fungsionalisme Kebudayaan* adalah salah satu teori yang dipergunakan dalam ilmu sosial, yang menekankan pada saling ketergantungan antara institusi-institusi (pranata-pranata) dan kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat tertentu.

a. Teori *Fungsionalisme* Bronislaw Malinowski

Teori *Fungsionalisme* dalam ilmu Antropologi mulai dikembangkan oleh seorang pakar yang sangat penting dalam sejarah teori antropologi, yaitu Bronislaw Malinowski (1884-1942). Ia kemudian mengembangkan suatu kerangka teori baru untuk menganalisis fungsi kebudayaan manusia, yang disebutnya dengan teori fungsionalisme kebudayaan atau *a functional theory of culture*. Bagi Malinowski (Ihroni 2006), mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme, yang beranggapan atau berasumsi:

“...bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat di mana unsur itu terdapat. Dengan kata lain, pandangan fungsionalisme terhadap

³⁴ *Ibid*, 52.

kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat, memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan yang bersangkutan.“

Menurut pandangan Malinowski fungsi dari satu unsur budaya adalah kemampuannya untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan yang timbul dari kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sekunder dari para warga suatu masyarakat. Kebutuhan pokok adalah seperti makanan, reproduksi (melahirkan keturunan), kenyamanan (*body comfort*), keamanan (*safety*), rekreasi (*Relaxation*), pergerakan (*movement*) dan pertumbuhan (*growth*). Beberapa aspek dari kebudayaan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar itu, muncul kebutuhan jenis kedua (*derived needs*), kebutuhan sekunder yang harus juga dipenuhi oleh kebudayaan.

Pada dasarnya kelompok sosial atau organisasi merupakan kebutuhan manusia yang suka berkumpul dan berinteraksi, yang kemudian perilaku ini berkembang dalam bentuk yang lebih solid dalam artian perkumpulan tersebut dilembagakan melalui rekayasa manusia

Kondisi pemenuhan kebutuhan tak terlepas dari sebuah proses dinamika perubahan ke arah konstruksi nilai-nilai yang disepakati bersama dalam sebuah masyarakat (dan bahkan proses yang dimaksud akan terus bereproduksi) dan dampak dari nilai tersebut pada akhirnya membentuk tindakan-tindakan yang terlembagakan dan dimaknai sendiri oleh masyarakat bersangkutan yang pada

akhirnya memunculkan tradisi upacara perkawinan, tata cara dan lain sebagainya yang terlembaga untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia tersebut. Hal inilah yang kemudian menguatkan tese dari Malinowski yang sangat menekankan konsep fungsi dalam melihat kebudayaan. Ada tiga tingkatan oleh Malinowski yang harus terekayasa dalam kebudayaan yakni:³⁵

1. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan dan prokreasi
2. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan.
3. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif, seperti agama dan kesenian.

³⁵Antropology Mind, <http://oechoe.blogspot.com/2010/04/fungsionalisme-malinowski.html>, "Fungsionalisme Malinowski" (Minggu, 14 Juli 2013)